

Hendri Kampai: Kaidah Penulisan Editorial

Updates. - [PUBLIKRIAU.COM](https://publikriau.com)

Sep 16, 2024 - 18:21



PENDIDIKAN - Editorial, atau tajuk rencana, adalah artikel opini yang ditulis oleh redaksi media untuk menyampaikan pandangan institusional mengenai suatu isu penting. Untuk menghasilkan editorial yang baik, terdapat beberapa kaidah yang harus diikuti:

1. Topik yang Aktual dan Relevan: Editorial harus membahas isu-isu yang sedang menjadi perbincangan atau penting bagi khalayak. Topik tersebut perlu memiliki relevansi dengan kepentingan publik dan dapat mempengaruhi opini atau kebijakan.

2. Pendapat yang Jelas dan Tegas: Tujuan editorial adalah menyampaikan pandangan yang jelas dan tegas terhadap suatu masalah. Tidak boleh ada ambiguitas dalam penyampaian pendapat redaksi, dan editorial harus bersifat argumentatif.

3. Dasar Argumentasi yang Kuat: Setiap opini dalam editorial harus didukung oleh data, fakta, dan analisis yang kuat. Sumber informasi yang valid dan terpercaya sangat penting untuk mendukung argumen yang disampaikan.

4. Struktur yang Sistematis:

Pendahuluan: Menyajikan isu atau masalah yang akan dibahas. Di sini pembaca diperkenalkan dengan konteks topik.

Analisis atau Pembahasan: Bagian utama editorial yang menguraikan argumentasi, data, dan pandangan redaksi terkait isu tersebut. Pandangan pro dan kontra perlu dipertimbangkan, tetapi editorial tetap berpihak pada argumen yang dipilih.

Kesimpulan: Bagian penutup yang merangkum posisi redaksi dan menawarkan solusi atau rekomendasi. Biasanya, kesimpulan ini mendorong pembaca untuk merenungkan atau mengambil tindakan.

4. Bahasa yang Santun dan Berwibawa: Editorial mewakili suara institusi media, sehingga bahasa yang digunakan harus sopan, formal, dan berwibawa. Hindari penggunaan bahasa yang terlalu kasar atau emosional.

5. Objektif dalam Perspektif: Meskipun editorial adalah opini, redaksi perlu menjaga keseimbangan dan objektivitas dalam penyajian fakta dan argumen. Argumen yang disampaikan harus didasarkan pada logika dan analisis yang obyektif, bukan sekadar opini yang emosional.

6. Mendorong Diskusi Publik: Editorial yang baik tidak hanya menyampaikan pandangan redaksi, tetapi juga mengundang pembaca untuk berpikir lebih jauh dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Editorial sebaiknya memberi perspektif baru atau solusi alternatif.

7. Tidak Terlalu Panjang: Panjang editorial harus disesuaikan dengan ruang yang tersedia, tetapi tetap padat dan informatif. Hindari penjelasan yang bertele-tele, fokus pada inti isu.

Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, editorial dapat menjadi alat yang efektif untuk memengaruhi opini publik, mendorong perubahan, dan mempertahankan kredibilitas media.

Berikut ini adalah contoh tulisan Editorial (Tajuk Rencana)

Judul: Membangun Ekosistem Digital yang Inklusif untuk Desa-desa di Indonesia

Indonesia sedang berada di titik kritis dalam upaya digitalisasi desa-desa, yang sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia 4.0. Desa, sebagai fondasi dari kehidupan sosial dan ekonomi nasional, memiliki peran penting dalam pembangunan. Namun, meski berbagai program telah dicanangkan, kesenjangan digital antara desa dan kota masih sangat besar. Saatnya

pemerintah dan sektor swasta bergandengan tangan untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, khususnya bagi desa-desa yang masih tertinggal.

Analisis Masalah: Data menunjukkan bahwa akses internet di desa-desa Indonesia masih sangat terbatas. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), hanya sekitar 43% yang memiliki akses internet yang memadai. Masalah ini semakin diperparah oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Sementara itu, sektor ekonomi desa yang berbasis pertanian dan usaha kecil-menengah (UKM) membutuhkan akses ke teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program digitalisasi, seperti program Desa Digital dan pembangunan infrastruktur Palapa Ring. Namun, program ini sering kali terhambat oleh implementasi yang tidak merata dan kurangnya pemahaman masyarakat desa tentang manfaat teknologi. Selain itu, masih sedikit desa yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan platform e-commerce atau layanan keuangan digital.

Solusi dan Rekomendasi: Pertama, pemerintah perlu mempercepat penyediaan infrastruktur digital di desa-desa, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Kerja sama dengan sektor swasta, seperti penyedia layanan internet, sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lebih cepat dan efisien.

Kedua, selain infrastruktur, pemerintah juga perlu fokus pada edukasi digital. Masyarakat desa perlu dibekali dengan pengetahuan yang memadai tentang bagaimana teknologi dapat membantu mereka meningkatkan taraf hidup. Pelatihan-pelatihan tentang e-commerce, pertanian pintar (smart farming), dan keuangan digital harus menjadi prioritas.

Ketiga, pemerintah perlu memastikan bahwa program-program yang sudah diluncurkan, seperti Dana Desa, juga dialokasikan untuk mendukung digitalisasi. Selain membangun jalan dan jembatan, penggunaan dana tersebut bisa diarahkan pada pengadaan perangkat teknologi atau pusat-pusat internet desa yang bisa diakses oleh masyarakat setempat.

Kesimpulan: Digitalisasi desa bukan lagi sekadar wacana, tetapi kebutuhan mendesak untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan merata. Dengan membangun ekosistem digital yang inklusif, desa-desa di Indonesia dapat bertransformasi menjadi pusat-pusat ekonomi yang produktif dan inovatif. Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bergerak bersama untuk mewujudkan transformasi ini. Hanya dengan itu, kita dapat memastikan bahwa setiap desa di Indonesia dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital global dan turut serta dalam pembangunan bangsa yang lebih adil dan sejahtera.

Catatan: Editorial ini memadukan pendapat tegas dengan analisis masalah serta solusi yang realistis, sesuai dengan kaidah editorial yang baik.

Dengan mengikuti kaidah-kaidah ini, editorial dapat menjadi alat yang efektif untuk memengaruhi opini publik, mendorong perubahan, dan mempertahankan kredibilitas media.

Jakarta, 16 September 2024

Hendri Kampai

Wartawan Utama, Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)